

BAB 4
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

4.1 Profil Kecamatan Pesanggrahan

Letak lokasi penelitian berada dalam wilayah Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan. Kecamatan Pesanggrahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1996, mempunyai luas wilayah 1346,78 ha, terbagi dalam 5 Kelurahan, 8 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Kondisi dan peruntukan wilayah Kecamatan Pesanggrahan sebagian besar merupakan kawasan pemukiman dan perdagangan, hal ini dapat dilihat kondisi dimana sarana perdagangan memiliki porsi yang cukup besar, yaitu jumlah pusat perdagangan, pertokoan, toko, kios serta warung sebesar (selain pemukiman penduduk) Kecamatan Pesanggrahan berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Wilayah Kelurahan Joglo Kembangan
- Sebelah Barat : Wilayah Kelurahan Kreo, Kota Tangerang dan Kelurahan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang
- Sebelah Timur : Wilayah Kelurahan Cipulir
- Sebelah Selatan : Wilayah Kelurahan Rengas, Ciputat

Secara demografis, jumlah penduduk Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan sebanyak 155.951 jiwa, yang terdiri atas 81.965 jiwa laki-laki dan 73.986 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar di 5 Kelurahan, 8 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT), dan dari jumlah tersebut terdapat 27.815 kepala rumah tangga. Usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah ini terdiri dari 16.099 orang (usia 6 – 10 tahun) dan 10.746 orang (usia 11 – 17 tahun). Struktur mata pencaharian yang menonjol pada wilayah ini adalah karyawan swasta (4.958 orang), pedagang (4.023 orang), buruh (3.346 orang), dan bekerja di bidang pemerintahan (2.584 orang).

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun suatu bangsa, tanpa didukung oleh suatu sistem pendidikan yang baik akan sulit bagi suatu bangsa untuk berkembang dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Namun, sungguh ironis, di Indonesia pembangunan di bidang pendidikan masih kurang diperhatikan. Dari segi pendidikan, secara umum Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan masih mengalami beberapa masalah. Hal ini terlihat dari indikator yang menunjukkan masih rendahnya pendidikan di Kecamatan Pesanggrahan. Indikator-indikator tersebut seperti: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih tergolong rendah, yakni sebesar 8,07 persen, (2) tingkat pendidikan penduduk dimana jumlah penduduk yang mengecap pendidikan hanya sampai pada jenjang pendidikan dasar sebesar 39.499 orang (SD) dan 22.029 orang (SMP), sangat besar dibandingkan dengan tamatan SMA (30.984 orang), Akademi (2.680 orang) maupun Strata 1 (1.336 orang) memposisikan kecamatan Pesanggrahan sebagai kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk ini sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan pendidikan di kecamatan Pesanggrahan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi/memperkecil peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa datang.

Untuk infrastruktur pendidikan, terdapat 39 Taman Kanak-kanak, 16 Sekolah Dasar, 13 Sekolah Menengah Pertama dan 17 Sekolah Menengah Atas dan 5 Perguruan Tinggi. Selain itu infrastruktur pendidikan lain yang setara dengan sekolah umum adalah 11 Madrasah Ibtidaiyah, 6 Madrasah Tsanawiyah dan 3 Madrasah Aliyah.

4.2 Profil Sekolah

4.2.1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Pesanggrahan

SDN 10 merupakan satu-satunya SD di Kecamatan Pesanggrahan yang berpredikat sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN). Berlokasi di Jalan Cenek Nomor 15, Komplek Kodam Bintaro, Pesanggrahan. Sekolah ini memiliki visi

mewujudkan peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terdepan dalam kepribadian. Sedangkan misi sekolah ini adalah: (1) mengembangkan sistem pembelajaran konstektual dan adaptif (2) mengembangkan kurikulum sebagai wahana penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan yang kompetitif (3) mengembangkan ekstrakurikuler sebagai aktualisasi potensi kepribadian siswa (4) mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai (5) menyediakan tenaga pendidik dan karyawan yang profesional (6) mewujudkan program sertifikasi dan kualifikasi (7) mengembangkan kepribadian, keterampilan dan jiwa sosial (8) mengembangkan kepemimpinan yang revolusioner, dan (9) mengembangkan sistem penilaian yang berbasis prestasi. Ruang Kelas di sekolah ini terdapat 10 kelas yang dilengkapi Speaker pada setiap kelas, juga 2 ruangan guru, 1 ruangan Tata Usaha dan Karyawan, dan 1 ruangan Kepala Sekolah serta Wakil Kepala Sekolah. Di mana tiap ruangan tersedia bangku dan meja yang bersih dan lengkap disertai pendingin udara/AC. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 7480 m².

Fasilitas lainnya adalah tersedianya ruang bagi siswa untuk berkreasi dibidang seni yaitu ruang bermusik, dimana tersedia peralatan-peralatan seperti alat musik yang biasa digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler marching band. Jumlah siswa untuk saat ini adalah 325 siswa dengan keseluruhan 18 rombongan belajar. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa hanya 1,8% orang tua siswa yang dikategorikan ekonomi menengah ke bawah, sisanya adalah menengah/sejahtera (48%) dan kategori menengah ke atas (51%).

Prestasi Lulusan

- a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 9,82 dan 100% lulus;
- b. Prestasi Lomba – lomba akademik sekolah (rata-rata mencapai prestasi sampai tingkat Propinsi);

- c. Prestasi non akademik sekolah dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai juara pertama atau kedua mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat Propinsi).

Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Guru 94% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, 2% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan tetapi telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sisanya 4% berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan semuanya sedang melanjutkan pendidikan S1, beberapa guru mata pelajaran IPA dan Bahasa Inggris meraih prestasi di tingkat Kotamadya, serta hanya 34% dari seluruh jumlah guru yang mampu mengoperasikan komputer;
- b. Tenaga Kependidikan
- Tenaga TU telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 52% mampu mengoperasikan komputer;
 - Kepala TU, berpendidikan S1 sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan mampu mengoperasikan komputer;
 - Tenaga administrasi keuangan dan akuntan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Tenaga administrasi sarana prasarana berpendidikan S1 berpengalaman dalam mengembangkan sarana prasarana pendidikan sehingga dapat mencapai status SSN;
 - Pustakawan, laboran dan teknisi komputer sekitar 96% sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pengembangan kurikulum

Kurikulum SDN 10 Pesanggrahan memenuhi standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- a. 100% guru telah menyusun program tahunan, posem, kalender pendidikan serta silabus mata pelajaran;
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun RPP;
- c. Program remedial dan pengayaan. 58% guru melaksanakan remedial dan baru 47% guru yang meakukan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan, hal itu dikarenakan sekolah memilih guru-guru terbaik sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan.

Sarana prasarana

- a. Sarana dan prasarana (fasilitas) lengkap dan memadai dapat dikatakan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahan dan sumber belajar
 - Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya dalam kondisi cukup baik di perpustakaan;
 - Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada beberapa mata pelajaran;
- c. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media pembelajaran yang konvensional yaitu *white board* sampai yang modern seperti OHP, infokus sampai peralatan lain seperti komputer;
- d. Lingkungan sekolah aman dan tertib serta memiliki media informasi elektronik (*website*) yang dapat diakses setiap saat.

Pengembangan proses belajar mengajar

- a. Proses pembelajaran telah memenuhi Sstandar Nasional Pendidikan yaitu jumlah guru yang melaksanakan CTL sebesar 92%;
- b. Mampu mengembangkan inovasi pembelajaran secara maksimal.

Pengembangan penilaian

- a. Memiliki standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- b. Sistem penilaian tersusun dengan baik, mulai dari penilaian harian, penilaian tengah semester sampai penilaian akhir semester;
- c. Telah memiliki bank soal sebagai database sistem penilaian yang baik;
- d. Telah memiliki sistem administrasi validasi soal secara menyeluruh;
- e. Telah memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi.

4.2.2 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Bintaro

SDN 14 Bintaro terletak di Jalan MKJ Nomor 19 Pesanggrahan merupakan salah satu sekolah negeri yang terbilang sudah lama berdiri, yaitu pada tahun 1980. Terletak di pemukiman padat, lingkungan SDN 14 Bintaro terbilang sangat ramai. Sekolah ini memiliki visi menjadi sekolah negeri yang berwawasan luas dan terdepan dalam menyambut era globalisasi. Sedangkan misi sekolah ini adalah: (1) meningkatkan penghayatan dan pemahaman ajaran agama serta nilai-nilai budaya bangsa (2) meningkatkan mutu pembelajaran ilmu-ilmu dasar dan bahasa (3) menghasilkan siswa yang disiplin, berkepribadian, cerdas dan terampil (4) mengintensifkan peran dalam pembangunan pengembangan prasarana dan sarana untuk menunjang proses pembelajaran (5) mengoptimalkan sumber dana internal dan eksternal (6) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana (7) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pendidikan (8) memantapkan organisasi, dan (9) membangun kerjasama internal dan eksternal.

Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 7050 m² terdiri 2 lantai dan 12 ruang, karena ruang kelas yang tersedia tidak mampu menampung seluruh siswa, maka proses belajar mengajar terbagi dalam 2 shife. Fasilitas lainnya adalah tersedianya perpustakaan sekolah, lapangan untuk berolahraga dan beberapa sarana penunjang kebersihan (contoh: wastafel). Jumlah siswa untuk saat ini adalah 315 siswa dengan keseluruhan 12 rombongan belajar. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa terdapat 37% orang tua siswa yang dikategorikan pra sejahtera, sisanya adalah menengah (44%) dan kategori mampu (19%).

Prestasi Lulusan

- a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 7,86 dan 100% lulus;
- b. Prestasi Lomba – lomba akademik sekolah (rata-rata belum mencapai prestasi);
- c. Prestasi non akademik sekolah belum dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai kejuaraan tingkat kecamatan).

Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Guru 67% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 10% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan hanya sebagian yang telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, sisanya 23% berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, sayangnya belum ada yang melanjutkan pendidikan S1, semua guru belum memiliki prestasi baik di tingkat kotamadya maupun propinsi;
- b. Kepala sekolah berpendidikan S1 dan mampu mengoperasikan komputer;
- c. Tenaga Kependidikan
 - Tenaga TU hanya 5% yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan mampu mengoperasikan komputer;
 - Kepala TU, berpendidikan S1 sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
 - Tenaga administrasi keuangan dan akuntan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan juga pengalaman serta kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, tetapi untuk bendahara sekolah selaku petugas yang membantu mengelola dana BOS memiliki pengalaman sebagai kepala TU dan mengelola biaya pendidikan di sekolah ini;
 - Tidak memiliki tenaga administrasi sarana prasarana, selama ini kepala sekolah dengan wakil yang memiliki peran sebagai tenaga administrasi sarana prasarana;

- Pustakawan, laboran dan teknisi komputer belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pengembangan kurikulum

Kurikulum SDN 14 Bintaro telah memenuhi standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- d. 100% guru telah menyusun program tahunan, posem, dan silabus mata pelajaran, untuk kalender pendidikan sekolah hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun RPP;
- f. Program remedial dan pengayaan. 65% guru melaksanakan remedial dan 41% guru yang meakukan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan.

Sarana prasarana

- a. Prasarana dan sarana (fasilitas) tidak lengkap dan memadai, belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahan dan sumber belajar
 - Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain lain dalam kondisi banyak yang rusak;
 - Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- c. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media pembelajaran yang konvensional sampai yang cukup modern seperti papan tulis, OHP dalam jumlah yang belum proposional dengan jumlah siswa;
- d. Lingkungan sekolah tertib tetapi belum cukup aman, karena pagar sekolah rusak, belum diperbaiki, jalan masuk ke sekolah yang cukup curam. Sekolah ini juga belum memiliki jaringan komunikasi akademik (website).

Pengembangan penilaian

- a. Memiliki standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan (KKM belum memenuhi SNP);
- b. Sistem penilaian belum tersusun dengan baik;
- c. Belum memiliki bank soal sebagai database sistem penilaian yang baik;
- d. Belum memiliki sistem administrasi validasi soal secara menyeluruh;
- e. Belum memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi.

4.2.3 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 177 Pesanggrahan

SMPN 177 merupakan salah satu sekolah yang berpredikat sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN). Berdiri pada tahun 1982, dan berlokasi di Jalan Raya Kodam, Bintaro, Pesanggrahan, sekolah ini memiliki visi mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang dicintai oleh masyarakat dan bermotokan era bersatu, era berpadu dan era kesatuan. Sedangkan misi sekolah ini adalah: (1) menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan basis KBK (2) melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dalam kelulusan (3) melaksanakan peningkatan penggunaan sarana dan prasarana yang berkualitas (4) melaksanakan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (5) melakukan inovasi dalam peningkatan mutu pembelajaran (6) melaksanakan pengembangan dalam penggunaan media pembelajaran, dan (7) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 8500 m² terdiri 3 lantai dan 45 ruang. Fasilitas lainnya adalah tersedianya laboratorium IPA, Bahasa dan Komputer. Jumlah siswa untuk saat ini adalah 360 siswa dengan keseluruhan 27 rombongan belajar, yang menempati 27 ruang kelas yang dilengkapi dengan pendingin ruangan/AC. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa hanya 1% orang tua siswa yang dikategorikan pra sejahtera, sisanya adalah sejahtera (44%) dan purna sejahtera (55%).

Prestasi Lulusan

- a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 8,35 dan 100% lulus;
- b. Prestasi Lomba – lomba akademik dan non akademik sekolah (mencapai prestasi sampai di tingkat nasional).

Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Guru 70% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 14% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan tetapi telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sisanya 16% berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan dan setengahnya sedang melanjutkan pendidikan S1, semua guru belum prestasi baik di tingkat kodya maupun propinsi dan 18% sudah mampu mengoperasikan komputer;
- b. Guru BK, memiliki 3 orang guru BK berpendidikan S1 jurusan BK, serta diberi wewenang menangani masalah yang berhubungan dengan peserta didik, ketiga – tiganya belum mampu mengoperasikan komputer;
- c. Kepala sekolah berpendidikan S1 dan mampu mengoperasikan komputer;
- d. Tenaga Kependidikan
 - Tenaga TU 38% sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 62% belum mampu mengoperasikan komputer;
 - Kepala TU, berpendidikan S1 sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan mampu mengoperasikan komputer;
 - Tenaga administrasi keuangan dan akuntan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan tetapi berpengalaman bekerja sebagai administrasi keuangan;
 - Tenaga adminisrasi sarpras berpendidikan SMA berpengalaman sebagai tenaga-tenaga administrasi sarpras dan mampu mengoperasikan komputer
 - Pustakawan, laboran dan teknisi komputer belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Universitas Indonesia

Pengembangan kurikulum

Kurikulum SMPN 177 Jakarta memenuhi standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- g. 100% guru telah menyusun program tahunan, posem, kalender pendidikan serta silabus mata pelajaran;
- h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun RPP;
- a. Program remedial dan pengayaan. 58% guru melaksanakan remedial dan baru 47% guru yang meakukan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan, hal itu dikarenakan sekolah memilih guru-guru terbaik sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan.

Pengembangan proses belajar mengajar

- a. Proses pembelajaran belum memenuhi Sstandar Nasional Pendidikan yaitu baru 40% guru melaksanakan CTL;
- b. Belum mengembangkan inovasi pembelajaran secara maksimal.

Sarana prasarana

- a. Prasarana dan sarana (fasilitas) cukup lengkap dan memadai tetapi belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahan dan sumber belajar
 - Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain lain dalam kondisi sebagian rusak;
 - Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- c. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media pembelajaran yang konvensional sampai yang modern seperti OHP, infokus dalam kuantitas yang belum proposional dengan jumlah siswa;
- d. Lingkungan sekolah aman dan tertib dan memiliki jaringan komunikasi akademik (website) tapi masih sederhana.

Pengembangan Pembiayaan

- a. Pembiayaan masih rendah per siswa per bulan Rp. 129.500,- sumber dana dari BOS dan BOP;
- b. Belum memiliki usaha sekolah yang mempengaruhi pada keuntungan ekonomi untuk membantu penyelenggaraan sekolah;
- c. Belum menjalani kerjasama dengan alumni untuk penggalangan dana.

Pengembangan penilaian

- a. Memiliki standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan (KKM belum memenuhi SNP);
- b. Sistem penilaian belum tersusun dengan baik;
- c. Belum memiliki bank soal sebagai database system penilaian yang baik;
- d. Belum memiliki sistem administrasi validasi soal secara menyeluruh;
- e. Belum memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi.

4.2.4 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 178 Rempoa

SMPN 178 terletak di Jalan Mawar Nomor 6A Rempoa, Pesanggrahan. Sekolah ini berada di tengah perkampungan penduduk yang padat. Di sekolah ini terdapat beberapa fasilitas umum seperti SDN dan MTs dan pusat perbelanjaan sehingga daerah ini termasuk daerah yang sangat ramai. Siswa SMPN 178 berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi umumnya mereka berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Mata pencarian orang tua pada umumnya adalah karyawan swasta, PNS/TNI/POLRI dan selebihnya adalah buruh. Sekolah ini memiliki visi unggul dalam mutu berdasarkan iptek dan imtak. Sedangkan misi sekolah ini adalah: (1) mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif (2) mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional (3) mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (4) mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan yang relevan (5) mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif (6) mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang baik (7) mewujudkan standar pembiayaan pendidikan yang

memadai (8) mewujudkan sistem penilaian yang autentik, dan (9) mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi budaya bangsa.

Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 7650 m² terdiri 2 lantai dan 18 ruang. Fasilitas lainnya adalah tersedianya laboratorium IPA, Bahasa dan Komputer. Jumlah siswa untuk saat ini adalah 328 siswa dengan keseluruhan 21 rombongan belajar. Karena kelas yang tersedia hanya 11 ruang, maka mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar menjadi 2 shife.

Prestasi Lulusan

- a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 7,71 dan 100% lulus;
- b. Prestasi Lomba – lomba akademik sekolah (rata-rata belum mencapai prestasi);
- c. Prestasi non akademik sekolah belum dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai kejuaraan tingkat kecamatan).

Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Guru 70% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 14% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan tetapi telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sisanya 16% berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan setengahnya sedang melanjutkan pendidikan S1, semua guru belum prestasi baik di tingkat kodya maupun propinsi dan 18% sudah mampu mengoperasikan komputer;
- b. Guru BK, memiliki 3 orang guru BK berpendidikan S1 jurusan BK, serta diberi wewenang menangani masalah yang berhubungan dengan peserta didik, ketiga – tiganya belum mampu mengoperasikan komputer;
- c. Kepala sekolah berpendidikan S1 dan mampu mengoperasikan komputer;
- d. Tenaga Kependidikan

- Tenaga TU 38% sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 62% belum mampu mengoperasikan komputer;
- Kepala TU, berpendidikan S1 sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan mampu mengoperasikan komputer;
- Tenaga administrasi keuangan dan akuntan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan tetapi berpengalaman bekerja sebagai administrasi keuangan;
- Tenaga administrasi sarpras berpendidikan SMA berpengalaman sebagai tenaga-tenaga administrasi sarpras dan mampu mengoperasikan komputer
- Pustakawan, laboran dan teknisi komputer belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pengembangan kurikulum

Kurikulum SMP 178 Jakarta memenuhi standar Nasional Pendidikan dari kelas 7, 8 dan 9

- a. Penyusunan prota, posem dan kalender pendidikan 100% guru telah membuat silabus, 75% guru telah menyusun silabus walaupun masih adopsi dari MGMP;
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 75% guru telah menyusun RPP;
- c. Program perbaikan dan pengayaan. Guru 70% melaksanakan perbaikan dan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan dan baru 25% guru yang telah menyusun program perbaikan dan pengayaan.

Pengembangan proses belajar mengajar

- a. Proses pembelajaran belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu baru 40% guru melaksanakan CTL;
- b. Belum mengembangkan inovasi pembelajaran secara maksimal.

Sarana prasarana

- a. Prasarana dan sarana (fasilitas) cukup lengkap dan memadai tetapi belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahan dan sumber belajar
 - Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain lain dalam kondisi sebagian rusak;
 - Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- c. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media pembelajaran yang konvensional sampai yang modern seperti OHP, infokus dalam kuantitas yang belum proposional dengan jumlah siswa;
- d. Lingkungan sekolah aman dan tertib dan memiliki jaringan komunikasi akademik (website) tapi masih sederhana.

Pengembangan Pembiayaan

- a. Pembiayaan masih rendah per siswa per bulan Rp. 129.500,- sumber dana dari BOS dan BOP;
- b. Belum memiliki usaha sekolah yang mempengaruhi pada keuntungan ekonomi untuk membantu penyelenggaraan sekolah;
- c. Belum menjalani kerjasama dengan alumni untuk penggalangan dana.

Pengembangan penilaian

- a. Memiliki standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan (KKM belum memenuhi SNP)
- b. Sistem penilaian belum tersusun dengan baik
- c. Belum memiliki bank soal sebagai database system penilaian yang baik
- d. Belum memiliki sistem administrasi validasi soal secara menyeluruh
- e. Belum memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi

4.3 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, (2) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI), serta (3) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

4.3.1 Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: (1) SD/SDLB di kota Rp 400.000,-/siswa/tahun, (2) SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun, (3) SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575.000,-/siswa/tahun, (4) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570.000,-/siswa/tahun.

4.3.2 Waktu Penyaluran Dana

Tahun Anggaran 2009, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 dan semester 1 tahun pelajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September

Universitas Indonesia

dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulan. Untuk menyamakan persepsi tentang pendanaan pendidikan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, instansi dan masyarakat serta program BOS itu sendiri, akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

4.3.3 Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi: (1) biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, (2) biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya, (3) bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya, (4) Beasiswa yang merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

4.3.4 Sekolah Penerima BOS

Adapun sekolah yang menerima manfaat program BOS adalah (1) semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, (2) semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS, (3) bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut, (4) seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (5) sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel, (6) sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

4.3.5 Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program BOS yang terkait

pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun, (2) melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah, (3) anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara, (4) kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah, (5) kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel, (6) BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

4.3.6 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP No 48 Tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan, (2) sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah, (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4.3.7 Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua Peserta Didik

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas (1) biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya, (2) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

4.3.8 Mekanisme Alokasi

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut: (1) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi, (2) atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi, (3) Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah, (4) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-02A dan Format BOS-02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), (5) Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

4.3.9 Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam

Universitas Indonesia

RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut: (1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan), (2) pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, (3) pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan, (4) pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba), (5) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa), (6) pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, (7) pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset, (8) pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya, (9) pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS, (10) pengembangan profesi

guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS, (11) pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah, (12) pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos, (13) pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, (14) bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.

4.3.10 Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS dilarang untuk: (1) disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan, (2) dipinjamkan kepada pihak lain, (3) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya, (4) membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, (5) membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), (6) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat, (7) membangun gedung/ruangan baru, (8) membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran, (9) menanamkan saham, (10) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

BAB 5

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan mencoba menguraikan hasil penelitian efektivitas pemanfaatan program BOS. Dalam bab ini juga berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi sekolah-sekolah penerima dana BOS yang didukung dengan data primer hasil wawancara dengan informan-informan terpilih kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam menilai efektivitas program BOS kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun.

Dalam bidang pendidikan, yang dimaksud dengan mutu memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa kata kunci pengertian mutu, yaitu: sesuai standar, sesuai penggunaan pasar/pelanggan, sesuai perkembangan kebutuhan, dan sesuai lingkungan. Adapun yang dimaksud mutu sesuai dengan standar, yaitu jika salah satu aspek dalam pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun standar yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar sarana dan prasarana, (5) standar manajemen, (6) standar tenaga pendidik, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Penilaian sejauhmana tingkat mutu pendidikan dalam penelitian ini menggunakan indikator (1) masukan (*input*) yaitu SDM, dengan menekankan pada kualifikasi pendidikan baik yang dimiliki oleh guru maupun pengelola dana BOS, pengalaman dibidangnya, kompetensi, misalnya peran aktif guru dalam pelatihan/MGMP mata pelajaran yang menjadi bidangnya. Dana BOS yang diterima apakah telah tepat waktu dalam penyalurannya. Seleksi penerimaan siswa baru, setiap sekolah telah menetapkan standar minimal Ujian Nasional maupun tes potensi akademik sebagai salah satu syarat untuk menjangking calon siswa yang berkualitas. Peraturan yang relevan, dasar hukum yang diterbitkan pemerintah belum ada, tetapi telah diterbitkan Surat Edaran yang mengatur peruntukkan resmi dana BOS. Masukan lainnya yang berupa harapan para pihak,

(2) aktivitas (*process*) yang menyangkut kesesuaian antara pelaksanaan program di lapangan dengan juklak/juknis yang menjadi acuan bagi pelaksana, diukur dari penggunaan dana BOS apakah telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, (3) keluaran (*output*) yaitu prestasi akademis dan non akademis siswa, diukur dari pencapaian nilai UAN maupun UASBN dan prestasi dibidang ekstra kurikuler, seperti di bidang olah raga, seni atau keterampilan lainnya, dan keringanan biaya operasional sekolah. Keringanan biaya operasional sekolah, dimana dapat diukur apakah siswa telah dibebaskan dari SPP, biaya pembelian buku, dan sebagainya.

Dalam pemilihan sekolah sebagai lokasi penelitian, peneliti direkomendasikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Pesanggrahan untuk berkunjung ke SDN 14 Bintaro dan SMPN 178 Pesanggrahan yang dikategorikan sebagai sekolah potensial, serta SDN 10 Pesanggrahan dan SMPN 177 Pesanggrahan yang dikategorikan Sekolah Standar Nasional (SSN), yang merupakan sekolah yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik (guru), standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Sekolah potensial merupakan sekolah yang masih relatif banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan SNP.

5.1 Hasil Penelitian

Sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan program BOS di Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi didalam proses pelaksanaan program, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan-informan yang terkait seperti Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pesanggrahan, Pemerhati Pendidikan, Kepala Sekolah (di dalam wawancara didampingi oleh bendahara sekolah), serta orang tua siswa, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwasanya program BOS berjalan cukup efektif. Beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan setidaknya dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pemanfaatan program BOS dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan operasionalisasi konsep yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwasanya dalam melakukan wawancara, peneliti berpijak pada teori evaluasi program Bruce W. Tuckman.

Pertama, dari segi pencapaian masukan berkaitan dengan SDM, walaupun tidak ada persyaratan khusus berkaitan dengan petugas yang menangani program BOS, tetapi dalam mengelola dana BOS beberapa faktor kualifikasi seperti latar belakang pendidikan serta pengalaman perlu diperhatikan. Petikan wawancara dengan Ibu Renty Silalahi selaku Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Pesanggrahan, Bapak Tadjudin Nur Kepala Sekolah SMPN 177 dan Ibu Nuraini orang tua siswa SDN 14 Bintaro mengungkapkan hal tersebut:

“selama ini bendahara sekolah yang mengelola dana BOS cukup kompeten dalam arti dari latar belakang pendidikan sesuai dengan bidangnya, berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di sekolah, karena sejak pertama mengabdikan di sekolah ini telah bergabung dengan bagian Tata Usaha mengelola administrasi pembiayaan sekolah siswa” (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2009).

“untuk SDM yang terpilih mengelola program BOS di DKI Jakarta merupakan SDM terpilih yang cakap dan mampu, petugas baik dari Dinas Pendidikan Propinsi maupun kepala sekolah cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan yang timbul, misalnya masalah keterlambatan penyaluran, lainnya adalah memberikan sedikit penyuluhan bagaimana menyusun RAPBS sesuai dengan kondisi sekolah agar dana BOS dapat dimanfaatkan dengan efektif. Sejak semula program BOS dilaksanakan saya selalu tekankan kepada pihak sekolah bahwa dana yang dikelola jumlahnya besar dan secara langsung/tidak

langsung menyangkut proses KBM, jadi untuk SDM yang diberi kepercayaan mengelolanya harus memiliki kemampuan dan pengalaman” (hasil wawancara tanggal 10 Desember 2009).

Sedangkan Bapak Mahali Harahap selaku pemerhati pendidikan menilainya sebagai berikut

“selama ini yang saya temui di beberapa sekolah di wilayah ini, kepala sekolah dan bendahara sekolah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS cukup kompeten, kualifikasi pendidikan berasal dari ilmu ekonomi sudah sesuai dengan bidangnya. SDM lain seperti petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta maupun dari sudin dikdas juga profesional dalam bekerja, mereka memahami dengan baik juklak maupun juknisprogram BOS” (hasil wawancara tanggal 16 Desember 2009).

Informasi dan keterangan yang didapat dari orang tua siswa SDN 14 Bintaro adalah sebagai berikut

“yang saya ketahui bendahara sekolah adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS di sekolah ini, karena yang saya ketahui beliau sangat berpengalaman sebagai bendahara sekolah, dari segi pendidikannya juga memadai.” (hasil wawancara tanggal 12 Desember 2009).

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program juga telah memadai, seperti yang dituturkan oleh Ibu Evi Harini, Kepala Sekolah SDN 10 Pesanggrahan

“untuk kelengkapan program ya kami disini memiliki sarana prasarana yang memadai, seperti komputer, ruang pertemuan yang dapat digunakan bagi petugas.” (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2009).

Universitas Indonesia

Mengenai peraturan yang terkait dalam program BOS, pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) belum mengeluarkan peraturan yang sedianya mengatur program BOS secara keseluruhan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pendanaan Pendidikan setidaknya dapat dipergunakan oleh *stakeholders* sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Renty Silalahi, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pesanggrahan

“untuk program BOS ini memang dasar hukumnya berpijak dari PP Nomor 48/2009 ya, kalau yang khusus mengatur BOS belum ada, walaupun sejauh ini pusat dan propinsi mengeluarkan edaran dalam rangka menindaklanjuti PP tersebut, edaran tersebut cukup komprehensif dalam mengatur pelaksanaan program.” (hasil wawancara tanggal 10 Desember 2009).

Bapak Mahali Harahap, pemerhati pendidikan menilai perlu ada dasar hukum yang kuat, yang mengatur program BOS secara khusus

“sayang memang pemerintah hanya mengeluarkan peraturan yang mengatur pembiayaan di bidang pendidikan secara keseluruhan, padahal di dalam program BOS penyaluran dana menyangkut pembiayaan pendidikan jumlahnya sangat besar dan sifatnya nasional, seharusnya pemerintah menerbitkan dasar yang lebih kuat lagi yang mengatur program secara detail.” (hasil wawancara tanggal 16 Desember 2009).

Seperti pelaksanaan program pada umumnya, perlu adanya *feedback* dari penerima manfaat program tersebut, maka peneliti mencoba mencari informasi tentang harapan orang tua siswa. Ibu Hasanah, orang tua siswa SMPN 177 dan menuturkan harapannya seperti berikut

“untuk ke depannya dilanjutkan ke tingkat SMA, soalnya kalau untuk SD sebenarnya masih bisa kita tanggung, nah yang SMA kadang biayanya terlalu mencekik. Tapi kalau pemerintah juga berat kalau ada BOS untuk SMA, terus tidak diadakan, ya kita harapannya mungkin jumlahnya bantuan untuk SD sama SMP ditambah. Terus dari sekolah juga mungkin lebih bijak lagi penggunaannya untuk apa saja, jangan yang tidak penting didahulukan, yang penting malah nomor sekian, lebih bijak dan lebih transparan ya.” (hasil wawancara tanggal 12 Desember 2009).

Sedangkan Bapak H. Tawarno, Kepala Sekolah SDN 14 Bintaro berharap program BOS lebih lanjut akan berjalan lebih baik lagi, berikut penuturannya

“saya cukup lama menjadi kepala sekolah disini, saya merasakan manfaat program BOS ini sangat bagus yah, tapi pelaksanaan lebih lanjut mungkin pemerintah harus mengatur, tidak menutup kemungkinan partisipasi orang tua maupun masyarakat, karena kalau ada BOS tapi sekolah dilarang untuk memungut biaya untuk keperluan tertentu yang berkenaan langsung dengan pembelajaran, sekolah harus mencari jalan keluar bagaimana mencukupi kebutuhan, kalau sekarang ini tidak semua sekolah partisipasi orang tua/masyarakat itu tinggi.” (hasil wawancara tanggal 15 Desember 2009).

Kedua, dari pencapaian proses program BOS, selama 4 tahun berjalan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk penggunaan dana BOS, pihak sekolah mengalokasikannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam juklak. Penuturan Ibu Renty Silalahi, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pesanggrahan berikut menjelaskan bagaimana deskripsi alokasi dana BOS digunakan oleh sekolah

“karena saya disini memiliki peran dalam manajemen BOS tingkat Kota, maka saya turut berperan dalam pengawasannya. Berdasarkan laporan

yang diterima dari sekolah-sekolah tersebut, tren yang saya nilai setiap tahunnya seperti ini, untuk periode awal program BOS, sekolah menggunakannya untuk perbaikan sarana prasarana sekolah, pada periode ini kami menemukan beberapa unsur penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kecil sekolah, kami tegur sekolah-sekolah itu dan mereka memperbaikinya, setelah itu pada pertengahan kami menemukan satu penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, hingga pada periode akhir program ini setelah dimonitor dan dievaluasi, kami melihat sekolah-sekolah telah sesuai koridor penggunaan resminya, hanya saja untuk pengadaan buku teks pelajaran, berdasarkan laporan yang diterima, masih terkendala sampai saat ini ” (hasil wawancara tanggal 10 Desember 2009).

Secara garis besar, berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS, peneliti melihat sekolah menggunakan dana BOS untuk keperluan seperti (1) pengadaan sarana dan prasarana sekolah, (2) biaya tambahan kegiatan operasional sekolah, seperti honorarium guru honorer, (3) kegiatan ekstra kurikuler dan (4) biaya pelajaran tambahan. Seluruh *item* penggunaan tersebut tidak melanggar ketentuan juklak/juknis program. Salah satu sekolah yang diteliti memberikan contoh anggaran yang didukung dana BOS sebagai berikut

Tabel 6
Anggaran Pemanfaatan Dana BOS

No	Keterangan	Nilai
1	Honorarium Guru	Rp 25.680.000,00
2	Rapat Dinas	Rp 3.000.000,00
3	Pengadaan Alat Bahan dan Praktik	Rp 11.412.000,00
4	Kegiatan Evaluasi	Rp 60.620.000,00
5	Kegiatan TPM dan LES	Rp 11.780.000,00
6	Penunjang KBM	Rp 9.400.000,00
7	Kegiatan Siswa	Rp 80.129.000,00
8	Peningkatan Profesionalisme Guru	Rp 11.500.000,00
Jumlah		Rp 213,521,000.00

Ketiga, dari segi pencapaian hasil, pemanfaatan program BOS yang mengacu pada mutu pendidikan sangat dirasakan oleh orang tua siswa. Secara umum mutu diartikan sebagai derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dapat dipandang dari segi proses pendidikan dan hasil pendidikan (Depdiknas, 2007).

Ditinjau dari sisi proses, pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari segi *input*, seperti; kualitas siswa, bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (kemampuan guru mengajar), sarana sekolah, dukungan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Untuk mencapai hasil pendidikan tersebut, sekolah dituntut mampu mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtransi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Untuk itu dalam menjaring siswa yang berkualitas pihak sekolah mensyaratkan standar nilai bagi calon siswa yang akan mendaftar, seperti yang dituturkan oleh Bapak Tadjudin Nur, Kepala Sekolah SMPN 177

“.....kami selalu menstandarkan nilai minimal untuk masuk adalah 8. siswa yang mau masuk nilainya selisih antara satu dengan lainnya rapat sekali, jadi butuh kerja keras untuk menseleksi mereka.” (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2009).

Mengenai kompetensi guru, setiap sekolah mengusahakan pengembangan merata bagi setiap guru mata pelajaran dan membina guru sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan program BOS dalam pengembangan kompetensi guru diusahakan sekolah dengan berbagai macam cara, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhaimin Dzikir, Kepala Sekolah SMPN 178

“untuk pengembangan guru, kami pihak sekolah sedapat mungkin memanfaatkan dana BOS, misalnya mengikutsertakan guru-guru pada MGMP setiap mata pelajaran, memfasilitasi kebutuhan guru, dan diklat-diklat yang diadakan oleh lembaga swasta, dalam hal ini selain dari BOS kami juga memanfaatkan BOP.” (hasil wawancara tanggal 15 Desember 2009).

Kompetensi guru sangat erat kaitannya dengan metode pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu menerjemahkan kurikulum ke dalam KBM agar transfer ilmu dapat berjalan secara optimal. Kemampuan guru dalam menterjemahkan tergantung dari kompetensi yang dimilikinya. Berikut petikan wawancara dengan Bapak H. Tawarno, Kepala Sekolah SDN 14 Bintaro dalam mensikapi metode pembelajaran kaitannya dengan program BOS

“ untuk KBM agar dapat berjalan efektif perlu adanya harmonisasi antara guru dengan siswa. Untuk guru di sini kompetensi selalu ditekankan untuk dikembangkan. Soal metode pembelajaran membutuhkan kompetensi guru yang maksimal, kami selalu mengirim guru untuk ikut serta dalam acara seperti workshop mengenai kurikulum misalnya, jadi ilmu yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam KBM. Untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan seperti itu kami memanfaatkan dana BOS...” (hasil wawancara tanggal 15 Desember 2009).

Mengenai sarana prasarana yang mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terlihat sekolah sedapat mungkin memanfaatkan untuk perawatan sarana prasarana yang telah ada, pembelian buku, dan sarana prasarana sekolah lainnya. Berikut petikan wawancara dengan salah satu orang tua siswa SMPN 178 berkaitan dengan pemanfaatan BOS bagi sarana prasarana sekolah

“sebenarnya BOS bantu orang tua sekali, meringankan biaya, tapi masih banyak kekurangan juga, paling nyata soal buku, saya dapat laporan dari anak saya, satu kelas buku yang dibagi gak cukup jadi bisanya satu buku

Universitas Indonesia

untuk dua anak, ternyata gak hanya di kelas anak saya, semua kelas seperti itu.” (hasil wawancara tanggal 12 Desember 2009).

Bapak Tadjudin Nur, Kepala Sekolah SMPN 177 dan Ibu Evi Harini, Kepala Sekolah SDN 10 Pesanggrahan menyampaikan pendapat yang tidak jauh berbeda

“sebenarnya BOS membantu pelaksanaan KBM di sekolah ya, pos pengeluaran sekolah yang berasal dari BOS adalah untuk guru honorer, itu mengambil 50% dari BOS. Yang saya sayangkan pada penggunaan buku. BOS yang sekarang kan dibonceng oleh BOS buku, jumlahnya naik tidak signifikan tapi ada pembelian buku didalamnya. Kalau untuk beli buku dana terbatas maka buku yang terbeli kualitasnya seperti apa sudah tertebak ya. Kalau pemerintah beralasan ada buku elektronik yang dapat di download dari internet, sayangnya berdasarkan penilaian guru-guru di sini buku-buku tersebut sepertinya tidak komprehensif isinya, tidak membantu guru untuk mentransfer ilmu, buku-buku yang bermutu malah tidak masuk daftar buku elektronik. Selebihnya untuk menunjang KBM ya efektif ya, dari peralatan penunjangnya sampai gurunya semua merasakan manfaatnya.” (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2009).

“BOS untuk operasional sekolah sangat membantu, termasuk didalamnya pemeliharaan sarana serta prasarana sekolah. Perbaikan ruang kelas kami dapat dari BOS, kalau ruang kelas jadi bagus siswa akan nyaman untuk mengikuti pelajaran, mendukung KBM sekali itu, pembelian sarana lainnya itulah yang jadi masalah sekolah kami ini adalah pengadaan buku teks mata pelajaran tertentu. Dana BOS itu efektif untuk perawatan sarana prasarana seperti yang saya kemukakan sebelumnya, tapi kurang fleksibel peruntukkannya dalam menyediakan sarana belajar yang menurut saya sangat vital, yaitu buku.” (hasil wawancara tanggal 10 Desember 2009).

Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan sumatif, ujian nasional). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.

Angka kelulusan di SDN 14 Bintaro relatif baik, terhitung sejak pelaksanaan program BOS, seluruh siswa dinyatakan lulus (100%), dan seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kemampuan siswa terhitung masih dalam kategori cukup, dalam arti tidak ada nilai ujian siswa yang terlalu menonjol. Rata-rata nilai ujian sekolah adalah sebagai berikut

Tabel 7
Daftar Nilai UASBN SDN 14 Bintaro

Tahun Pelajaran	Rata-rata UAN					
	Bhs Indo	MTK	Bhs Inggris	IPA	Jumlah	Rata/rata tiga/empat mapel
2006/2007	7.95	8.27	7.83	8.09	32.14	8.03
2007/2008	8.24	8.30	8.22	8.15	32.91	8.22
2008/2009	8.24	8.56	8.30	8.27	33.37	8.34

Sumber: profil SDN 14 Bintaro

Mengenai tingkat kelulusan siswa pada SMPN 178, pada periode pelaksanaan program BOS dimulai sampai tahun, semua siswa lulus dengan rata-rata nilai cukup memuaskan.

Tabel 8
Daftar Nilai UAN SMPN 178

Tahun Pelajaran	Rata-rata UAN					
	Bhs Indo	MTK	Bhs Inggris	IPA	Jumlah	Rata/rata tiga/empat mapel
2006/2007	8.17	7.96	8.08		25.92	8.64
2007/2008	7.57	7.76	6.93	7.43	29.69	7.15
2008/2009	8.20	7.47	7.31	7.67	30.65	7.48

Sumber: profil SMPN 178

Angka kelulusan di SDN 10 Pesanggrahan relatif baik, terhitung sejak pelaksanaan program BOS, seluruh siswa dinyatakan lulus (100%), dan seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kemampuan siswa terhitung masih dalam kategori sangat memuaskan, dalam arti tidak ada nilai ujian siswa yang di bawah rata-rata. Rata-rata nilai ujian sekolah adalah sebagai berikut

Tabel 9
Daftar Nilai UASBN SDN 10 Pesanggrahan

Tahun Pelajaran	Rata-rata UAN					
	Bhs Indo	MTK	Bhs Inggris	IPA	Jumlah	Rata/rata tiga/empat mapel
2006/2007	8.87	9.02	8.96	9.12	35.97	8.99
2007/2008	8.89	9.11	8.96	9.15	36.11	9.02
2008/2009	8.91	9.10	9.06	9.15	36.22	9.05

Sumber: profil SDN 10 Pesanggrahan

Mengenai tingkat kelulusan siswa pada SMPN 177, pada periode pelaksanaan program BOS dimulai sampai tahun, semua siswa lulus dengan rata-rata nilai memuaskan.

Tabel 10
Daftar Nilai UAN SMPN 177

Tahun Pelajaran	Rata-rata UAN					
	Bhs Indo	MTK	Bhs Inggris	IPA	Jumlah	Rata/rata tiga/empat mapel
2006/2007	8.39	8.73	8.80		25.92	8.64
2007/2008	8.40	8.17	8.40	8.15	3.12	8.28
2008/2009	8.40	8.80	7.86	8.34	33.40	8.35

Sumber: profil SMPN 177

Selain nilai UAN yang relatif baik, sekolah-sekolah tersebut memiliki prestasi akademik lain, umumnya seperti lomba debat bahasa Inggris, Karya Ilmiah Remaja (KIR), serta lomba lainnya yang pencapaiannya bervariasi dari tingkat Kecamatan sampai tingkat nasional. Untuk prestasi non akademik siswa, dapat dilihat pada profil masing-masing sekolah dimana setiap sekolah rata-rata memiliki prestasi di bidang olahraga dan kesenian.

Selain menyangkut mutu pendidikan, masalah dana BOS sendiri patut diamati, apakah dalam penyalurannya telah tepat waktu, prosedur penyaluran, sampai persyaratannya. Kepala sekolah SDN 10 Pesanggrahan, Ibu Evi Harini sebagai pelaksana mengungkapkan pendapat sebagai berikut

“kalau untuk prosedur saya rasa tidak ada masalah, kami menyambut baik terobosan pemerintah yang memangkas birokrasi sebelumnya, sekarang kami terhubung langsung dengan Propinsi dalam penyalurannya, untuk persyaratan tidak ada yang dipersulit, hanya saja masalah ketepatan penyalurannya sering terlambat, terutama pada periode awal tahun.” (hasil wawancara tanggal 10 Desember 2009).

Hal lain yang sangat penting dalam pencapaian hasil adalah soal keringanan biaya sekolah, apakah dengan adanya program BOS, orang tua siswa masih dibebankan

pungutan/iuran lain. Orang tua siswa SDN 10 Pesanggrahan dan SDN 14 Bintaro memberi keterangan sebagai berikut

“kalau untuk biaya sekolah terutama SPP, kami memang tidak dipungut, tetapi terkadang untuk biaya tidak terduga pihak sekolah masih memungut dari kami, seperti misalnya biaya remedial siswa, yang tidak tertutup oleh BOS, dan sekolah sangat transparan pada orang tua, mereka meminta persetujuan kami lebih dulu. Satu hal yang pasti, pungutan-pungutan seperti itu sangat jarang sekali dilakukan oleh sekolah.” (hasil wawancara tanggal 12 Desember 2009).

“sejak BOS ada yang saya rasakan sebagai orang tua, jadi tambah semangat sekolahin anak, soalnya tidak dipungut SPP lagi, kalau untuk pembelian buku, sekolah juga membebaskan orang tua untuk membeli di luar, kalau pungutan lainnya hampir tidak ada, paling hanya pada saat pendaftaran saja”. (hasil wawancara tanggal 10 Desember 2009).

5.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan BOS

Berbagai kendala yang ditemui oleh informan dalam program BOS ini adalah sebagai berikut

“kalau untuk hambatannya ya lebih ke pencairannya, sering terlambat, selain itu jumlahnya masih minim kalau untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang beragam”.

“dananya sering terlambat turun, jadi seringkali sekolah harus menutupi biaya operasional yang semestinya didanai BOS”.

“Sosialisasi kepada masyarakat sangat diabaikan, masyarakat dalam hal ini orang tua siswa, pada awalnya menganggap BOS itu membebaskan mereka dari seluruh biaya, terlebih setelah ada jargon sekolah gratis, sering protes ke sekolah, mengapa masih ada penarikan biaya, sering

Universitas Indonesia

membandingkan kami dengan sekolah lain, padahal kondisi tiap sekolah itu kan berbeda. Kami sempat berpikir untuk mensosialisasikan BOS, tapi kembali lagi pada keterbatasan dana yang dimiliki, yang lain mungkin lebih ke arah ketepatan waktu penurunan dana BOS”.

“....., hanya saja saya masih sering terima pengaduan dari sekolah kalau untuk mencairkan dana BOS itu administrasinya terkadang dibuat rumit, jajaran pemda sering lamban dalam mengurus administrasinya”.

Setelah sosialisasi, tahapan lain yang paling kurang memuaskan adalah penanganan pengaduan, penyaluran dana, serta pelaporan dan monitoring evaluasi. Banyak pihak menilai bahwa penanganan pengaduan kurang transparan, dan pihak-pihak non-pemerintah khususnya merasa kesulitan dalam menyalurkan aduan masyarakat yang mereka terima. Selain itu, cukup banyak yang tidak yakin bahwa beberapa pengaduan sudah ditindaklanjuti secara memadai. Masalah penyaluran dana yang paling banyak disoroti adalah keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif, dan bahkan mendorong sekolah untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan realisasinya, sebagaimana dijelaskan di subbab mengenai pemanfaatan dana dan pelaporan dari sekolah. Sedangkan dalam pelaporan dan monitoring evaluasi, permasalahan yang paling banyak dikemukakan adalah kesulitan sekolah dalam menyusun laporan keuangan dan banyaknya lembaga yang ikut melakukan monitoring evaluasi, serta pemanfaatan kegiatan monitoring evaluasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan program BOS di Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, menggunakan teori evaluasi program yang diungkapkan oleh Bruce W. Tuckman yang membagi analisa dengan

menggunakan metode terkait masukan (*input*) program, proses program sampai hasil (*output*) yang dicapai oleh program itu sendiri.

5.3.1 Pencapaian Masukan (*Input*)

Masukan program BOS dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS, sarana prasarana penunjang pelaksanaan program, peraturan-peraturan terkait program BOS, dan harapan para pihak, baik pelaksana maupun penerima manfaat program BOS.

5.3.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam proses pelaksanaan program BOS faktor lain yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Tanpa sumber-sumber daya tersebut proses pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini mudah dimengerti karena proses pelaksanaan program sudah tentu menuntut tersedianya SDM yang cukup baik dalam jumlah maupun terlebih-lebih kualifikasinya, sebagai bekal untuk menterjemahkan kerangka dasar kebijakan ke dalam praksis layanan publik.

Komitmen SDM dalam mengelola program yang ditandai dengan; dedikasi yang tinggi, sifat pro-aktif, antusiasme dan kemampuannya dalam proses kerja, merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses program. Sulit dibayangkan bagaimana pelaksana program BOS dapat menyiasati strategi untuk mencapai tujuan ketika mereka dihadapkan pada kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan program BOS, misalnya pluralitas sasaran kebijakan, kondisi sosial-budaya tertentu, dan kondisi dimana diperlukan penggunaan teknologi tertentu.

Mudah dimengerti bahwa dalam proses implementasi diperlukan adanya; (1) kesungguhan top leader, misalnya ketua komite atau tataran otoritas yang lebih tinggi, (2) dukungan moral dan finansial atau sumber-sumber lain yang diperlukan, (3) komitmen dan kecakapan SDM. Masukan program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM yang terlibat di dalamnya.

Profesionalisme dan kualitas cukup baik, mereka dapat memahami dengan baik, peraturan-peraturan maupun juklak atau juknis sebagai dasar pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan persyaratan sebagai langkah awal, pengelolaan dana sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Pengalaman mereka didukung oleh pendidikan yang memadai, seluruhnya berpendidikan sarjana, dan sebagian besar latar belakang pendidikan telah sesuai dengan bidang yang mereka tekuni yaitu manajemen keuangan.

5.3.1.2 Dana

Banyaknya permasalahan yang terjadi seputar pelaksanaan program BOS ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program BOS ada masalah. Masalahnya adalah dana BOS tidak datang pada saat dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan sekolah, yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan anak didik, tidak dapat ditunda. Ada dua faktor penyebab sehingga terjadi hal itu. Pertama, ada perbedaan antara tahun anggaran dengan tahun pelajaran. Tahun anggaran dimulai 1 Januari, sedangkan tahun pelajaran dimulai bulan ketiga bulan Juli. Dana BOS bergulir berdasarkan tahun anggaran, sedangkan sekolah berjalan berdasarkan tahun pelajaran. Pada bulan Januari, Februari, Maret, ketika sekolah sudah harus berjalan dan dibiayai, anggaran baru dalam proses pengesahan.

Kedua, adalah sistem administrasi keuangan yang ketat. Dana BOS diberikan per tri wulan. Tetapi kehadirannya tidak pernah tepat pada awal triwulan. Ada kalanya pada bulan kedua, ada kalanya pada bulan ketiga. Sehingga pada awal triwulan sekolah belum memperoleh dana operasional sedangkan sekolah tetap harus berjalan.

5.3.1.3 Penerimaan Siswa Baru

Masukan (*input*) sekolah dapat dilihat dari kualitas siswa baru di sekolah. Keterkaitan antara jenjang pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP) sangat mempengaruhi kompetensi siswa baru. Siswa pada jenjang pendidikan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di tingkat SMP, akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan SMP yang

dituju. Selain dampak positif digulirkannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk setiap sekolah ternyata juga menimbulkan persoalan lain. Salah satunya adalah kompetisi perekrutan siswa baru yang tidak terkontrol. Hal tersebut dipicu ketentuan pengajuan dana BOS yang salahsatu di antaranya adalah mensyaratkan jumlah siswa yang perlu dibantu dana BOS.

Kewenangan pengajuan tersebut di bawah kewenangan sekolah, untuk menentukan siswa yang memerlukan bantuan. Sehingga untuk mendapatkan bantuan dana BOS dalam jumlah besar menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk menjaring siswa sebanyak-banyaknya. Kompetisi tersebut menimbulkan persaingan yang tidak sehat, sekolah dengan fasilitas sederhana semakin ditinggalkan. Terutama sekolah swasta, yang mendapatkan bantuan BOS relatif lebih kecil. Mereka harus bertahan, mengandalkan biaya yang dipungut dari siswa.

Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan untuk menjaring calon siswa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berdasarkan hasil penelitian, program BOS dalam kaitannya dengan penerimaan siswa baru sedikit dirasakan manfaatnya baik oleh sekolah maupun orang tua siswa. Hal ini dapat dilihat dari informasi kepala sekolah yang menjelaskan bahwa program BOS cukup efektif pemanfaatannya dalam penerimaan siswa baru, baik di sekolah potensial (SDN 14 Bintaro dan SMPN 178) maupun SSN (SDN 10 Pesanggrahan dan SMPN 177). Antusias orang tua untuk memasukkan putra putri mereka ke sekolah penerima dana BOS sangat besar, tetapi mereka tetap harus mengeluarkan biaya pendaftaran seperti untuk keperluan seragam, gedung maupun formulir. Dapat dilihat dari jumlah pendaftaran siswa baru yang melebihi batas. Namun daya tampung yang ada di setiap sekolah-sekolah tersebut jumlahnya terbatas sehingga tidak semua dapat masuk ke sekolah-sekolah dimaksud, karena daya tampung yang tersedia terbatas, maka dibutuhkan seleksi yang sangat ketat dalam menentukan kriteria calon siswa. Untuk jenjang pendidikan SD, pihak sekolah sedapat mungkin mengadakan tes terlebih dulu, tes tersebut merupakan tes untuk menilai kompetensi calon siswa. Untuk menyusun soal tes, SDN 10 Pesanggrahan tidak segan untuk

meminta bantuan lembaga psikologi pendidikan dan pihak guru-guru tentunya. Penyusunan, penggandaan maupun formulir kelengkapan data calon siswa membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka pihak sekolah memanfaatkan sedikit dana BOS yang ada, dengan asumsi kebutuhan sekolah lainnya yang telah dianggarkan dari dana BOS tetap diprioritaskan. Pihak sekolah tidak menggunakan dana BOS dalam jumlah besar untuk menjaring calon siswa karena tidak mencukupi untuk seleksi penerimaan yang berkualitas. SMPN 177 dan 178 selain menguji potensi akademis siswa melalui penetapan standar minimal nilai UASBN.

Dapat dikatakan program BOS belum terlaksana dengan efektif di bidang penerimaan siswa baru karena dari seluruh sekolah yang diteliti tidak semua sekolah secermat mungkin memanfaatkan dana BOS. Seyogianya pihak sekolah dapat memaksimalkan dana BOS yang diterima, tetapi karena terdesak oleh kebutuhan operasional lainnya yang lebih diprioritaskan, maka sekolah terpaksa membebani orang tua siswa, walaupun untuk mereka biaya tersebut tidak memberatkan.

5.3.1.4 Kompetensi Guru

Dari segi kegiatan belajar mengajar, banyak indikator yang dapat dilihat apakah program BOS efektif atau tidak. Pertama, faktor tenaga pendidik. Proses belajar mengajar di sekolah merupakan transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswanya. Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.

Salah satu peruntukan resmi program BOS adalah untuk pembayaran gaji guru honorer. Program BOS efektif jika menyentuh langsung guru honorer. Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Dalam memandang kelanjutan pendidikan, peningkatan prestasi pendidikan harus ditingkatkan, peningkatan ini melalui proses pembelajaran di kelas. Hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi hendaknya bagi setiap warga negara harus dijamin oleh negara, sehingga orang tua cenderung akan memberikan informasi positif tentang dunia pendidikan bagi anak-anaknya kelak, yang akhirnya dapat menentukan pembentukan aspirasi pendidikan. Selain itu perlunya gerakan moral seperti menekankan pembiayaan ditingkat sekolah dasar serendah mungkin .

Faktor lain guna memperbaiki pendidikan adalah dengan mendorong para guru agar dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran ,juga mendorong peran orang tua untuk ikut membimbing dan memotivasi belajar anak dirumah. Hal yang lebih penting sebagai jangka panjang perlunya pemerintah mendorong untuk meningkatkan penghasilan para orang tua dengan membuka berbagai hal lapangan pekerjaan untuk kesempatan berusaha.

Peningkatan penerimaan guru, baik melalui peningkatan honor guru honorer maupun dari penerimaan tambahan bagi guru tetap dan tidak tetap berkaitan dengan peningkatan kegiatan belajar-mengajar. Dengan peningkatan penerimaan ini, ada indikasi bahwa semangat mengajar guru meningkat. Namun, ada juga keluhan di beberapa sekolah bahwa semangat guru tetap agak menurun karena mereka tidak mendapat alokasi dari dana BOS, sedangkan mereka tahu nilai dana BOS cukup besar dan biasanya dari iuran siswa yang jauh lebih kecil saja mereka mendapat alokasi.

Peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seperti MGMP dan KKG. Namun, perlu dicatat bahwa dampak kegiatan tersebut akan maksimal bila kualitas kegiatan tersebut dapat dijaga. Berkaitan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia (guru) di sekolah pada umumnya bersumber dari pembiayaan dana rutin dan dana BOS maupun dana untuk penyelenggaraan pelatihan. Namun demikian prosentase

Universitas Indonesia

keterlaksanaannya masih berkisar 60 – 80 % sedangkan penyelenggaraannya dilakukan tiap semester. Terhadap keterlaksanaan pembinaan guru di tingkat sekolah pada umumnya memperoleh dukungan dana dari dana BOS. Fenomena ini dianggap telah memberikan iklim yang baik terhadap peningkatan guru berbasis sekolah dengan pemanfaatan dana BOS. Peningkatan mutu guru juga selalu dibarengi dengan monitoring guru oleh kepala sekolah secara berkala.

5.3.1.5 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk kelengkapan program cukup lengkap, ditandai dengan adanya alat bantu untuk pelaksanaan program BOS seperti komputer, printer, dan arsip yang dikelola dengan sistematis serta tersedianya fasilitas ruang pertemuan. Struktur organisasi dan manajemen program BOS cukup baik, seperti halnya mekanisme yang berjalan di dalam organisasi. Struktur program BOS adalah terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah, mekanisme kerja dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi dan manajemen organisasi, seperti adanya ketua, bendahara, sekretaris, dan semua staf yang terlibat tersebut senantiasa mengadakan pertemuan untuk menjalankan dan menyalurkan dana BOS sebagaimana mestinya. Bahkan SMPN 177 beberapa waktu terakhir terkadang melibatkan unsur orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam proses pertemuan tersebut.

Sarana prasarana sekolah ikut berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar, sebenarnya program BOS berjalan cukup efektif, jika dilihat dari salah satu komponen pendukungnya yaitu sarana prasarana yang menunjang, hanya saja masih ditemui kendala dalam pembelian buku teks pelajaran. Dana BOS yang digulirkan ternyata tidak mencukupi pembelian buku teks pelajaran matematika, IPA dan IPS.

Kenaikan jumlah nominal dana BOS, ternyata tidak dirasakan oleh sekolah, terlebih lagi siswa, akibat keterbatasan tersebut sekolah hanya mampu membeli buku dimana jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa, atau membeli buku sejumlah siswa tetapi dengan kualitas buku yang rendah. Untuk itu hendaknya sarana prasarana dikelola dengan baik. Beberapa poin penggunaan

dana BOS diperuntukkan bagi pengadaan sarana prasarana, misal pembelian komputer, alat tulis, atau pemeliharaan/perawatannya.

Lebih lanjut lagi, solusi yang diajukan oleh pemerintah dalam masalah buku adalah dengan mengunduh buku melalui *electronic book (e-book)*, tetapi ternyata hal tersebut bukan merupakan solusi tepat karena kualitas e-book tersebut dinilai memiliki kualitas yang rendah. Tak kalah pentingnya, target program BOS yang lain adalah membiayai buku pelajaran pokok dan penunjang serta buku perpustakaan. Sayang, untuk komponen ini seluruh responden orangtua mengatakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli buku pelajaran sama saja, sebelum dan sesudah adanya BOS. Agaknya, sekolah mengalokasikan sebagian besar dana BOS untuk membayar atau meringankan uang sekolah siswa, bukan untuk meringankan pembelian buku pelajaran.

Padahal, orangtua mengharapkan dengan adanya BOS bisa meringankan biaya untuk membeli buku pelajaran. Harga buku sekarang kian mahal. Sebagai contoh, untuk satu paket buku kelas IV SD satu semester, orangtua di SMPN 177 harus mengeluarkan uang Rp 235.000. Belum lagi ditambah beban 12 Lembar Kerja Siswa, masing-masing Rp 5.000-Rp 6.000 yang harus dimiliki tiap siswa. Kecilnya manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap dana BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran boleh jadi karena secara nominal dana yang diberikan pada sekolah memang kecil. Atau bisa juga karena pihak sekolah tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuannya. Hal ini bisa saja terjadi karena mekanisme kontrol dari pemerintah dan komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dan orangtua masih lemah. Atau bisa saja karena tidak ada transparansi dari pihak sekolah mengenai penggunaan uang BOS. Bahkan, menurut cerita salah seorang orangtua murid, ketika menanyakan penggunaan uang BOS ke sekolah, pihak sekolah menjawab penjelasannya menyusul saat kenaikan kelas.

Peningkatan ketersediaan peralatan dan bahan ajar, baik yang habis pakai seperti kapur tulis maupun yang tidak habis pakai seperti peta, bola, peralatan keterampilan, penggaris dan sebagainya. Di beberapa sekolah miskin, peningkatan ini sangat terasa karena dengan biaya operasional yang sangat minim sebelum

Universitas Indonesia

adanya BOS, bahkan kapur saja seringkali tidak mencukupi sehingga guru jarang menulis di papan tulis dan murid juga jarang disuruh mengerjakan tugas di papan tulis. Oleh karenanya, kegiatan belajar-mengajar menjadi sangat membosankan. Dengan peningkatan sarana bahan ajar, guru menjadi lebih bersemangat dan bebas dalam menerapkan berbagai teknik mengajar. Namun, peningkatan kualitas kegiatan belajar-mengajar ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan kemampuan guru.

5.3.1.6 Peraturan Terkait

Suatu kebijakan publik, harus dilandaskan pada peraturan-perundangan otoritatif. Demikian juga program BOS perlu memiliki legitimasi sebagai rujukan dalam pengelolaan. Menurut *Dye*, suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan publik kalau ia dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Mengenai belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang program BOS, sebenarnya dapat disikapi dengan tetap mengacu pada peraturan yang telah terbit pada saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pendanaan Pendidikan, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/KU/2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2009 dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta Nomor 19/SE/2009.

5.3.1.7 Harapan Para Pihak

Tujuan awal digulirkannya bantuan operasional sekolah (BOS) adalah membantu membebaskan biaya yang dibebankan kepada murid dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pada tingkat dasar. Dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah. Pada tahun ajaran 2007/2008, jumlahnya mencapai Rp 12,5 triliun. Bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, BOS diandalkan untuk menyingkirkan hambatan keuangan yang selama ini menjadi penghalang dalam mendapat layanan pendidikan. Berbagai pungutan yang biasa dibebankan oleh sekolah, mulai pendaftaran hingga

Universitas Indonesia

kelulusan, diharapkan akan hilang. Namun, walau telah empat tahun bergulir, BOS belum mampu memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Masih saja ada kekurangan-kekurangan lain, misal minimnya dana yang diberikan, ketidaktepatan waktu penyaluran, sampai monitoring dan evaluasi yang jarang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyaluran dana BOS secara tepat waktu merupakan harapan masyarakat dan kesungguhan pemerintah. Supaya terlaksana sesuai harapan, yang terlibat di dalamnya harus ikut mengawal demi keadilan dan pemerataan dalam memperoleh jaminan pendidikan. Naiknya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN berimplikasi naiknya dana BOS. Tahun 2009 dana bagi SD/MI kabupaten sebesar Rp 397.000, untuk kota Rp 400.000 per tahun. Sedang SMP/Mts Rp 570.000 per kabupaten) dan Rp 575.000 per kota. Program BOS yang digagas pemerintah memang akan sulit memenuhi harapan masyarakat khususnya warga miskin yang masih memiliki beban ekonomi keluarga meski dana BOS telah naik hingga 50% pada tahun ini. Oleh karena sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, beban pembiayaan pendidikan juga ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda). Jika pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN sebanyak 20% untuk sektor pendidikan maka pemda seharusnya berkontribusi yang sama yakni menyisihkan 20% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang pendidikan.

Dari daftar kebijakan BOS tahun 2009, pemerintah dalam hal ini Depdiknas setidaknya memberikan 3 peran penting kepada pemda. Pertama, pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional BOS melalui APBD jika dana BOS dari Depdiknas tidak mencukupi. Kedua, pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar. Dan ketiga, pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan terhadap siswa yang mampu.

Dari kebijakan diatas, peran pemda cukup strategis terutama untuk menjamin kesediaan dana BOS bila tidak mencukupi melalui mekanisme

anggaran APBD-nya. Meski diakui tidak semua pemda baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota bersedia menyisihkan 20% anggaran APBD untuk sektor pendidikan.

5.3.2 Pencapaian Proses

Dalam pencapaian proses merujuk dari teori evaluasi program Bruce W. Tuckman, dilihat kesesuaian antara pelaksanaan program BOS dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Pelaksanaan program BOS diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya. Untuk itu, sebagai dasar untuk dapat melaksanakan program sesuai juklak/juknis maka dituntut pemahaman yang baik dari SDM yang terlibat terhadap juklak/juknis dimaksud.

Dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana BOS, dana BOS harus merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) di samping dana yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan dana BOS didasarkan atas kesepakatan antara sekolah dengan Komite sekolah. Untuk jenjang SD dan sederajat telah disepakati sebesar Rp 235.000 per tahun per siswa, sedang untuk tingkat SMP dan sederajat disepakati sebesar Rp 324.000 per tahun per siswa. Bahkan khusus untuk wilayah DKI Jakarta Pemrod DKI menambahkan bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 600.000 per tahun untuk tingkat SD dan Rp 500.000 untuk tingkat SMP. Dana ini nantinya digunakan untuk keperluan biaya telepon, air dan listrik, sebagian seragam siswa, serta evaluasi penerimaan siswa baru. Dananya sendiri berasal dari APBD DKI. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah.

Mengenai pengelolaan dana BOS menurut kepala sekolah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala sekolah telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan semua kepala sekolah juga memahami isi buku tersebut. Mengenai besar penggunaan dana BOS, informan menyatakan peruntukan dana BOS adalah untuk keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan perbaikan serta

Universitas Indonesia

melengkapi sarana sekolah. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun jenis sarana belajar yang paling banyak diperhatikan adalah media pembelajaran yang mencapai 60% dan buku pelajaran mencapai 55%, selanjutnya diperlukan untuk mengadakan LKS dan media elektronik.

Sebagai dampak dari pengelolaan sekolah dengan dukungan dana BOS, kepala sekolah menyatakan prestasi sekolah meningkat. Hal merupakan hasil yang menggembirakan, karena penyelenggaraan sekolah dengan bantuan dana BOS telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik. Hasil positif dari kepala sekolah yang lain adalah angka putus sekolah yang diakibatkan oleh biaya pendidikan telah mencapai angka nol, atau dengan kata lain sudah tidak ada anak yang putus sekolah di lokasi penelitian.

5.3.3 Pencapaian Hasil (*Output*)

Pencapaian hasil dalam pemanfaatan program BOS dapat diindikasikan dari *pertama*, apakah dana BOS yang disalurkan dapat meringankan beban orang tua siswa. *Kedua*, berkaitan dengan mutu pendidikan dasar 9 tahun, dapat diamati pencapaian sekolah dalam prestasi siswa, baik dalam bidang akademis dan non akademis.

5.3.3.1 Keringanan biaya sekolah bagi orang tua siswa

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang tua siswa, bahwa program BOS meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung, terutama SPP. Walaupun terkadang masih ada pungutan/iuran yang diminta oleh pihak sekolah, tetapi frekuensinya minimal sekali. Pendidikan dasar merupakan industri hulu yang harus memiliki mutu memadai, sehingga kualitasnya harus ditingkatkan karena pendidikan dasar menjadi dasar input ketika anak didik itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan dana tersebut, tak ada alasan bagi orang tua untuk enggan menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. Karena, para orang tua tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam pada setiap tahun ajaran baru untuk anak-anaknya yang akan bersekolah.

Kebijakan penambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar 50% pada tahun anggaran 2009, harus disikapi serius oleh sekolah. Jangan sampai, alokasi anggaran tersebut nantinya tidak tepat sasaran dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

5.3.3.2 Mutu Pendidikan

Di era persaingan global, Indonesia memerlukan sumberdaya manusia (SDM) paripurna. Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Karena itu, pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa. Dalam kaitan ini, mutu pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu untuk memacu peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar 9 tahun, diharapkan program BOS dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

5.3.3.3 Prestasi Siswa

Kemampuan/potensi siswa merupakan dasar utama bagi pencapaian prestasi. Kemampuan/potensi yang dimiliki siswa apabila dapat dikembangkan ke arah yang positif akan berdampak pada prestasi sekolah juga. Sedangkan dalam pengaruh pemanfaatan program BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah-sekolah penelitian mempunyai dampak/pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa

Sebagai dampak dari pengelolaan sekolah dengan dukungan dana BOS seluruh kepala sekolah menyatakan prestasi sekolah meningkat. Hal merupakan hasil yang menggembirakan, karena penyelenggaraan sekolah dengan bantuan dana BOS telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik. Hasil positif dari kepala sekolah yang lain adalah angka putus sekolah yang diakibatkan oleh biaya pendidikan telah mencapai angka nol, atau dengan kata lain sudah tidak ada anak yang putus sekolah di lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas nampak kaitan yang erat antara penguunaan dana BOS dengan indikator mutu pendidikan. Sekolah yang mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan tingkat satuan sekolah diharapkan dapat memanfaatkan dana BOS untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi sarana pembelajaran yang dibutuhkan.

Dengan demikian nampak kebermanfaatn dana BOS bagi peningkatan kualitas kegiatan dan mutu pendidikan di sekolah. Indikator terpenting lainnya adalah tidak terdapatnya angka putus sekolah yang diakibatkan oleh keberatan orang tua membayar iuran sekolah. Dampak lain yang diperoleh melalui wawancara adalah tingginya semangat belajar akibat dorongan semakin banyaknya kegiatan sekolah akibat dukungan dana BOS.

5.4 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program BOS

Dalam pelaksanaannya, program BOS tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer, program BOS mendapat berbagai respon, baik dari jajaran birokrasi, siswa, orangtua siswa maupun masyarakat. Seperti halnya program pemerintah lain, program BOS menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Pertama adalah minimnya sosialisasi kepada orangtua siswa yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Dikatakan minim karena beberapa sekolah yang diteliti mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi terbatas hanya untuk kalangan tertentu, yaitu komite sekolah, adapun sosialisasi tersebut diadakan oleh suku dinas pendidikan bukan sekolah. Sangat disayangkan karena komite sekolah pada umumnya adalah orang tua siswa yang bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk menjelaskan pada orang tua siswa lainnya. Sekali lagi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk mengadakan sosialisasi.

Di antara berbagai tahapan pelaksanaan Program BOS, secara umum menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan pelaksanaan yang dianggap paling tidak memuaskan. Berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian menilai bahwa sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dan kelancaran tahapan-tahapan berikutnya. Karena sosialisasi dalam

program ini dilakukan secara berjenjang, hasil ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kekurangan dalam mekanisme penyampaian materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat sekolah. Selain itu, permasalahan sosialisasi yang paling banyak dikemukakan adalah ketidakkonsistenan antara pesan yang disampaikan melalui media massa dengan materi sosialisasi internal program, khususnya mengenai pembebasan iuran siswa. Dengan keterbatasan dana, waktu, dan media sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana, pelaporan, dan penanganan pengaduan.

Pernyataan dari pihak sekolah menyebutkan bahwa tidak di poskan anggaran untuk mensosialisasikan program BOS. Akibatnya timbul miskomunikasi di kalangan orang tua siswa. Misalnya mengenai peruntukan resmi BOS, orang tua siswa beranggapan bahwa BOS tidak hanya membebaskan mereka dari biaya SPP setiap bulannya, tetapi juga biaya pribadi siswa seperti seragam dan transportasi. Padahal BOS hanya meringankan beban operasional sekolah. Selain itu, peruntukan resmi BOS yang terdiri dari 14 poin dipahami oleh orang tua siswa harus terpenuhi, padahal keadaan riil sekolah berbeda-beda antara satu dengan lainnya. 14 poin peruntukan resmi program BOS tidak mungkin dipenuhi seluruhnya oleh sekolah. Sebagai contoh, pos penggunaan dana BOS terbesar di SMPN 178 adalah untuk honorarium guru honorer karena jumlah guru honorer mereka cukup banyak bila dibandingkan dengan jumlah guru honorer di SMPN 177, akibatnya SMPN 177 dapat mengalokasikan dana BOS lebih banyak untuk kegiatan belajar mengajar.

Hambatan lainnya adalah periode pencairan dana yang tidak tepat waktu. Dana BOS yang diturunkan setiap 3 bulan sekali kerap kali dapat cair pada bulan ke dua bahkan bulan ke tiga. Keterlambatan tersebut mengakibatkan sekolah harus mencari pinjaman guna menutupi biaya operasional. Melemahnya partisipasi masyarakat menyebabkan program BOS seperti mata uang yang memiliki dua sisi, di satu sisi, penurunan atau bahkan pembebasan iuran sekolah bisa dianggap sebagai dampak positif yang sesuai dengan tujuan program, tetapi di sisi lain,

muncul kekhawatiran bahwa bantuan ini justru mengurangi keswadayaan masyarakat dan partisipasi berbagai pihak lain dalam pembiayaan pendidikan.

Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan program BOS adalah adanya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan tidak berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut.

Tabel 11
Hasil Operasionalisasi Efektivitas Program BOS di Kecamatan Pesanggrahan

Faktor-Faktor yang Diamati	Sumber Data	Hasil Penelitian	Penilaian
Evaluasi program menurut Tuckman dipengaruhi oleh masukan, proses, maupun keluaran program			
MASUKAN (<i>INPUT</i>) PROGRAM 1. SDM 2. Dana BOS 3. Sarana Prasarana 4. Penerimaan Siswa Baru 5. Peraturan terkait 6. Harapan para pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi Dikdas Kecamatan Pesanggrahan - Kepala Sekolah - Orang tua siswa - Pemerhati pendidikan 	1. SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS berlatar belakang S1, pengalaman mengelola biaya pendidikan selama lebih dari 5 tahun, kualifikasi pendidikan guru sebagian besar telah sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, aktif dalam berpartisipasi di diklat/MGMP mata pelajaran 2. Penyaluran dana BOS sering dikeluhkan karena tidak tepat waktu, tetapi prosedur penyaluran telah disusun sederhana oleh pemerintah agar sekolah tidak mengalami kesulitan dalam menyusun proposal permohonan dana BOS, alur birokrasi telah dipangkas sehingga dapat	Menurut Danim benar adanya bahwa dalam pendidikan, unsur input dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk diantaranya dana, sarana prasarana, maupun kualitas siswa Hasil wawancara dengan Kasi Dikdas Kec. Pesanggrahan, bahwa peraturan terkait dan harapan para

		<p>menghemat waktu, tidak semua sekolah transparan dalam memberikan penjelasan seberapa besar dana BOS yang diterima</p> <p>3. Sarana prasarana pendukung program dilengkapi dengan komputer, printer, arsip yang tertata bahkan ruang pertemuan. Sarana prasarana KBM di sekolah, baik perawatan maupun pengadaan/penambahan kuantitasnya salah satu sumber dananya adalah dana BOS</p> <p>4. Penerimaan siswa baru dilakukan melalui tes potensi akademik dan nilai standar minimal Ujian Nasional dalam menjaring calon siswa yang berkompeten</p> <p>5. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah belum merinci setiap detail pelaksanaannya, hanya menjabarkan peruntukkan resmi dana BOS</p> <p>6. Harapan sebagian informan adalah penyaluran dana BOS agar tepat waktu dan alokasi jumlahnya dapat ditambah, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi agar ada <i>feedback</i> bagi pihak sekolah sebagai pelaksana</p>	<p>pihak merupakan salah satu masukan bagi pelaksanaan program BOS di masa yang akan datang</p>
<p>PROSES PROGRAM</p> <p>Kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan juklak/juknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi Dikdas Kecamatan Pesanggrahan - Kepala Sekolah - Orang tua siswa 	<p>Pihak sekolah telah sesuai menggunakan dana BOS sesuai dengan peruntukkan resminya yang tercantum dalam juklak pelaksanaan program BOS yang diterbitkan pemerintah, hanya saja pembagian pos</p>	<p>Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan</p>

	- Pemerhati pendidikan	anggaran masih belum proporsional antara satu dengan lainnya	Pesanggrahan bahwa kesesuaian antara juklak program dengan pelaksanaan program dan pemahaman para pihak terkait terhadap juklak tersebut sangat mempengaruhi proses program
KELUARAN (<i>OUTPUT</i>) PROGRAM 1. Prestasi akademis dan non akademis siswa 2. Keringanan biaya operasional sekolah bagi siswa	- Kasi Dikdas Kecamatan Pesanggrahan - Kepala Sekolah - Orang tua siswa	1. Prestasi akademis yang diraih siswa sangat bervariasi, diantaranya nilai ujian dengan rata-rata nilai terendah 7,5 dan prestasi di bidang ilmiah seperti debat bahasa Inggris. Untuk prestasi non akademis siswa banyak dibidang ekstra kurikuler seperti bidang olahraga dan keterampilan lain 2. Setiap sekolah yang diteliti, 2 sekolah telah membebaskan siswa dari biaya SPP, 2 sekolah lainnya memberikan keringanan dengan menurunkan biaya SPP, biaya operasional sekolah lainnya seperti pembelian komputer tidak lagi dibebankan pada siswa	Menurut Danim output pendidikan dapat diteliti dari pencapaian prestasi siswa Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Dikdas Pesanggrahan bahwa keringanan biaya operasional sekolah adalah output yang ingin dicapai dari program BOS

5.5 Implikasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang

Universitas Indonesia

pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedang ayat 3 menyatakan wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program BOS yang dimulai sejak awal bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program. Program BOS, lebih lanjut, tidak akan berperan untuk mempertahankan APK, namun juga harus berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Diharapkan, dana BOS yang disalurkan dapat membantu mengembangkan proses belajar mengajar sehingga berimplikasi pada peningkatan prestasi siswa.

Hal ini merupakan salah satu kebijakan strategis Departemen Pendidikan Nasional untuk pemerataan akses pendidikan dengan menghapus hambatan biaya melalui pemberian BOS bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut.

Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Dalam memandang kelanjutan pendidikan, peningkatan prestasi pendidikan harus ditingkatkan, peningkatan ini melalui proses pembelajaran di kelas. Hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi hendaknya bagi setiap warga negara harus dijamin oleh negara, sehingga orang tua cenderung akan memberikan informasi positif tentang dunia pendidikan bagi anak-anaknya kelak, yang akhirnya dapat menentukan pembentukan aspirasi pendidikan. Selain itu perlunya

gerakan moral seperti menekankan pembiayaan ditingkat sekolah dasar serendah mungkin .

Dalam rangka menghindari terjadinya putus sekolah sebagai fenomena social dan sulitnya akses memperoleh pendidikan dari keluarga tidak mampu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor sosial, misalnya bidang pendidikan melalui BOS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak pengalihan subsidi BBM terhadap daya beli masyarakat, dan mencegah terjadinya putus sekolah. Dengan demikian pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan, yaitu melalui program peningkatan akses dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan implikasi kebijakan program BOS lebih kepada efektifitas program BOS, dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun.

Setelah BOS digulirkan, dalam pelaksanaannya program BOS menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pada satu sisi sangat membantu dan meringankan beban siswa dari keluarga tidak mampu, namun di sisi lain pihak sekolah, tidak semuanya mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pada awal pelaksanaannya, keluhan yang seringkali dilontarkan oleh sekolah adalah minimnya dana BOS yang diterima dan penyalurannya yang tidak tepat waktu. Masalah tersebut berdampak pada berkurangnya kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah. Terbukti yang terjadi pada sekolah yang diteliti yaitu SDN 14 Bintaro dan SMPN 178, kepala sekolah dan bendahara sekolah menyatakan ada beberapa kegiatan kesiswaan seperti ekstrakurikuler yang dihentikan.

Minimnya dana BOS tersebut, seharusnya dapat memaksa pemerintah untuk merealisasikan anggaran minimal 20% untuk bidang pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia meningkat, lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara 1945. Mengingat bahwa persoalan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan persoalan pendanaan /pembiayaan, maka program BOS seyogianya tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat atau orang tua siswa untuk berperan serta dalam pendanaan/pembiayaan pendidikan.

Universitas Indonesia

Program BOS yang bertujuan untuk meringankan bagi siswa yang tidak mampu benar-benar diterapkan sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat segera terwujud. Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182, Pasal 53 ayat 1: “pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.

Dengan demikian maka model program BOS yang diharapkan adalah tetap disertai dengan partisipasi masyarakat dan diarahkan untuk mewujudkan perubahan-perubahan. Perubahan yang dimaksud ditujukan pada upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia dapat selangkah lebih maju. Program BOS juga harus dilandaskan pada dukungan orang tua siswa, diharapkan dengan adanya dukungan dari mereka, pemahaman orang tua siswa lebih mendalam tentang program BOS itu sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”. Serta pada Pasal 46 ayat (1): “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Mengacu pada penjelasan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan dalam program BOS dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, antara lain:

Pertama, kewajiban pemerintah memberikan pendidikan yang layak kepada warga Negara seperti diamanatkan dalam konstitusi (UUD 1945), Konvensi Hak Anak (KHA), dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Kedua*, partisipasi serta dukungan masyarakat dan orang tua siswa, mulai dari keterlibatan mereka dalam rapat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pendanaan pendidikan di sekolah. *Ketiga*, kepemimpinan kepala sekolah yang sangat efektif sangat diperlukan dalam rangka pencapaian peningkatan mutu pendidikan, karena kepala sekolah memiliki peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan prestasi siswa. demikian halnya guru, yang

Universitas Indonesia

merupakan salah satu faktor keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, oleh karena itu guru diharapkan untuk selalu memanfaatkan waktunya dalam rangka peningkatan kompetensi, pengetahuan dan wawasannya. *Keempat*, koordinasi antara komite sekolah dengan pihak sekolah dapat memberikan andil yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah perlu meningkatkan peran sertanya dalam pencairan dana dalam rangka memaksimalkan kembali program/kegiatan kesiswaan di sekolah melalui upaya-upaya strategis dengan donor, baik perorangan, kelompok maupun perusahaan. Kelima, sarana-prasarana proses belajar mengajar yang ada perlu dioptimalkan dan ditingkatkan, karena ketersediaan sarana-prasarana sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar akan memberikan dampak positif mutu pendidikan.

Berdasarkan pada argumentasi yang telah dikemukakan, maka dapat disusun suatu usulan implementasi program BOS terkait dengan peningkatan mutu pendidikan antara lain; (1) peningkatan alokasi dana BOS hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah, karena pendidikan yang layak dan bermutu tidak terlepas dari pendanaan yang memadai, (2) dukungan dan peran serta orang tua siswa lebih ditingkatkan melalui subsidi silang, orang tua siswa yang mampu membantu yang tidak mampu, adanya orang tua asuh, dan sebagainya, (3) memberikan kebebasan kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk menterjemahkan poin-poin yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan BOS sesuai dengan keadaan riil sekolah masing-masing, karena yang lebih memahami kebutuhan sekolah adalah mereka, (4) sekolah hendaknya dapat dengan leluasa mengatur dana BOS yang diperoleh, dan kemudian menyalurkannya melalui skala prioritas yang telah disepakati sebelumnya, (5) diperlukan juga dukungan dan partisipasi yang maksimal dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah. Alur pencairan dana BOS yang sebelumnya harus melewati rangkaian proses birokrasi yang kompleks, kini telah diperbaiki dengan memangkas rangkaian tersebut, yaitu dana disalurkan langsung dari pemerintah kepada pemerintah daerah (tingkat propinsi) lalu sampai ke tingkat sekolah.